

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagianbesar negara di dunia termasuk Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak reformasi telah bertekad untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, dengan cara diadakannya pemilihan langsung yang melibatkan warga negaranya untuk ikut serta dalam proses pemberian suara (*voting*). Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota DPR dan DPRD, Pemilihan Anggota DPD hingga Pemilihan Kepala Daerah juga di laksanakan dengan cara yang demokratis. Di Indonesia sistem ini dikenal dengan nama pemilihan umum (pemilu). Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan dengan rentang waktu 5 tahun sekali dan diselenggarakan oleh suatu komisi pemungutan suara yang independent, dikenal dengan nama komisi pemilihan umum (KPU) sebagai mana tercantum dalam pasal 1 (ayat 6) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum yang menjelaskan bahwa “Pemilu di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Pemilihan umum mulai dari pemilihan legislatif sampai pada dua kali pemilihan Presiden boleh terlaksana dengan aman, jujur dan adil. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung dengan memilih kandidat-kandidat baik dari calon legislatif maupun calon eksekutif, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih sendiri kandidatnya. Pasca reformasi tahun 1998 ini banyak mengalami perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia. Diantaranya Pemilu tahun 1999 yang bersifat multipartai, dimana dibukanya kembali kesempatan untuk bergerak nya partai politik secara bebas termaksud mendirikan partai baru (Budiharjo, 2010: 483).

Pemilu adalah bagian penting dalam demokrasi. Pemilu jika diartikan secara sederhana adalah cara individu warga negara melakukan aktivitas politik ataupun kontrak politik dengan orang lain atau partai politik yang diberikan mandat atau wewenang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan rakyat/pemilih. Pemilu bukanlah pemberian mandat kekuasaan secara total. Klaim partai politik yang menyatakan bahwa partainya telah memiliki pemilih dengan jumlah total tertentu dalam pemilu adalah tidak tepat. Untuk menjalankan mandat tersebut partai politik atau eksekutif partai politik harus melakukan komunikasi politik dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat dengan persetujuan warga. Di berbagai negara, pemilihan umum merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif, dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga merupakan wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk kedalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Salah satu parameter pemilu yang demokratis adalah dengan adanya komponen pemilih yang semakin plural seiring dengan semakin kompleksnya pemilu. Ini artinya pemilih adalah pendukung utama yang sangat penting dalam proses pemilu yang demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Setiap pemilih dalam pemilihan umum tidak akan terlepas dari latar belakang politis maupun sosiologis pada saat itu, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam

menentukan pilihan mereka, inilah yang disebut *voting behavior* atau perilaku pemilih.

Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktivitas politik. Tidak cukup sampai disitu perubahan juga terjadi dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana rakyat pun diberi kesempatan untuk dapat memilih secara langsung presiden dan wakilnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing pemilih.

Pemilihan umum Presiden dan wakilnya tersebut dilakukan dengan sistem dua putaran. Artinya, kalau ada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara minimal yang ditentukan, akan diadakan putaran kedua dengan peserta dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga yang menjadi tujuan pokok adalah adanya pasangan calon yang terpilih yang mempunyai legitimasi kuat dengan perolehan suara 50% plus satu atau mayoritas mutlak. Seandainya pada putaran kedua tidak ada yang memperoleh suara 50% plus satu, yang akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan pemenang adalah pemerataan dukungan suara di tingkat provinsi ataupun Kabupaten/kota.

Dinamika perilaku pemilih sangat kompleks dalam setiap pemilihan umum. Apalagi Indonesia telah menyelenggarakan pemilu lebih dari lima kali. Hal ini dipengaruhi oleh pergolakan politik dan juga tingkat pendidikan serta tingkat ekonomi pemilih dalam pemilihan umum. Tingkat pendidikan maupun ekonomi masyarakat Indonesia terbukti dalam beberapa pemilu setelah masa reformasi sangat berpengaruh, inilah yang menimbulkan maraknya praktik menyimpang seperti *Money Politic*. Yang kemudian sangat mencederai sistem demokrasi yang dibangun oleh bangsa Indonesia agar tercipta *good governance*. Sehingga, tujuan

dari diadakannya pemilihan umum untuk mewujudkan demokratisasi, mewujudkan hak-hak rakyat dan mewujudkan partisipasi rakyat dalam politik untuk melakukan pendidikan dan pembangunan politik tidak akan pernah tercapai dengan baik. (Iman Hidayat, 2009:170)

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. (<http://www.kpu.go.id>)

Para pemilih merupakan *rational voters* yang mempunyai tanggungjawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas dan kemampuan kontrol yang kritis terhadap kandidat pilihannya, yang meninggalkan ciri-ciri *traditional voters* yang fanatik, primordial dan irasional, serta berbeda dari *swinger voters* yang selalu ragu-ragudan berpindah-pindah pilihan politiknya. Pemilih yang di dalamnya pemilih

pemula merupakan pemilih yang potensial. Karena pemilih pemula adalah subjek partisipasi dan bukan objek mobilisasi. Dari data yang dirilis KPU, jumlah total pemilih yang telah terdaftar untuk pemilu tahun 2014 adalah sejumlah 186.612.255 orang penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut 20-30% nya adalah Pemilih Pemula. Dalam pendidikan politik, kelompok muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu disebut dengan Pemilih Pemula. Pemilih Pemula ini terdiri dari mahasiswa dan siswa SMA yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali di tahun 2014 nanti (<http://www.antara.net>).

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih adalah warganegara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman *voting* pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik.

Dalam kategori politik kaum remaja dimasukkan dalam pemilih pemula, mereka adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilih. Dengan hak pilih itu kaum remaja yang berusia 17 tahun atau sudah menikah ini akan

mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama dengan kaum dewasa yang lain. Para pemilih pemula yang kebanyakan dari siswa siswi sekolah menengah atas serta mahasiswa/mahasiswi yang baru memasuki usia hak pilih pastilah belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan inilah yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi.

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula sering hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi untuk kepentingan politiknya, misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan pembentukan organisasi partai.

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Dalam menggunakan hak pilih politiknya itu, mengikuti tipologi model Almond dan Verba maka orientasi politik pemula ini dikategorikan menjadi, (1) orientasi kognitif, yaitu pengetahuan tentang dan kepercayaan pada kandidat, (2) orientasi politik afektif, yaitu perasaan terhadap pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan, dan (3) orientasi politik evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat pemilih pemula terhadap parpol/kandidat pilihannya. (Almond, A Gabriel dan Verba, 160:16)

Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu obyek politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang. Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik.

Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Ruang-ruang tempat di mana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka. Memahami kesadaran politik mahasiswa pemilih pemula dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia maka penulis tertarik untuk meneliti perilaku pemilih pemula pada Mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, bahwa mahasiswa yang masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, mahasiswa mempunyai ruang-ruang di mana mereka secara tidak langsung belajar politik. Alasan lain yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemilih pemula karena sebagai pemilih pemula tentu banyak hal-hal yang mempengaruhi para pemilih pemula dalam memilih pasangan Calon Presiden seperti : (1) pengaruh isu dalam kampanye, (2) pengaruh identifikasi kepartaian, dan (3) pengaruh orientasi

terhadap kandidat. Dan hal-hal yang mempengaruhinya inilah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penulis dalam hal ini terdorong untuk mengkaji lebih dalam dan memfokuskan pada perilaku pemilih pemula pada pemilihan Presiden Tahun 2014. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan penulis teliti secara rinci adalah :

1. Bagaimana perilaku pemilih pemula pada Pemilu Presiden tahun 2014 Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area?
2. Bagaimana kecenderungan perilaku pemilih pemula pada Mahasiswa FISIP UMA dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon atau kandidat tertentu pada Presiden 2014 tahun 2014 ?

## **1.3. Batasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan masalah agar dalam penjelasannya nanti akan lebih mudah, terarah dan sesuai dengan yang diharapkan serta terorganisir dengan baik. Pembuatan skripsi ini dibatasi pada masalah berikut : Apakah ada kecendrungan pengaruh kampanye, identifikasi

kepartaian dan orientasi terhadap kandidat dalam menentukan pilihan bagi pemilih pemula pada Mahasiswa FISIP UMA.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perilaku pemilih pemula pada Pemilu Presiden tahun 2014 Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
2. Untuk mengetahui kecendrungan mengenai pengaruh kampanye kandidat, identifikasi kepartaian dan orientasi terhadap perilaku memilih pemilih pemula Mahasiswa FISIP UMA padapemilu Presiden 2014.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat akademik**

1. Sebagai bahan informasi ilmiah untuk para peneliti lain yang ingin melihat perilaku pemilih pemula dalam pemilu presiden Tahun 2014
2. Memperkaya khasanah kajian ilmu pemerintahan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Menjelaskan fenomena sosial politik yang ada.

##### **b. Manfaat praktis**

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana perilaku politik para pemilih pemula pada Presiden 2014.

2. Bagi pemilih pemula (generasi muda)

Para generasi muda mengetahui pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu yang demokratis.

3. Bagi aktivis partai politik dan tokoh politik

Agar mereka lebih meningkatkan peran serta pemilih pemula pada kegiatan partai politik pada masa yang akan datang.

4. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

5. Bagi masyarakat

Dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum yang tertarik terhadap ilmu Politik dan menambah pengetahuan tentang pentingnya perilaku politik pemilih pemula.

